

LAPORAN POKOK-POKOK KESIMPULAN
RAPAT PANSUS RPJMD DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
Pertemuan I – Kamis, 22 Mei 2025

A. UMUM

Rapat Pansus dimulai pada pukul 10.00 WITA dan dipimpin oleh Ketua Pansus, H. M. Sarkawi Hamid, M.Si. Agenda rapat adalah pembahasan awal Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 - 2029. Rapat dihadiri oleh seluruh anggota Pansus, unsur pimpinan DPRD, perwakilan OPD terkait, serta Sekretariat DPRD.

B. POKOK-POKOK KESIMPULAN

1. Strategi Pembahasan dan Tahapan Kerja Pansus

- Disepakati bahwa tahapan kerja Pansus harus dirumuskan dengan timeline yang jelas untuk efektivitas waktu (masa kerja 70 hari).
- Perlu adanya konsultasi dengan Kemensos RI dan Kemenkes RI, serta pertemuan dengan Tim Ahli penyusun naskah akademik RPJMD.
- Ditekankan perlunya pelibatan publik, tokoh masyarakat, akademisi, dan mahasiswa dalam proses pembahasan agar RPJMD bersifat inklusif dan adaptif.

2. Tiga Program Kartu Unggulan: Kartu Lansia, Kartu Sehat, dan Kartu Pintar

a. Kartu Lansia

- Terdapat 23.000 lansia di Luwu Timur; 17.544 sudah masuk dalam DTKS.
- 8.079 lansia telah menerima bantuan sosial (PKH dan BPNT); 8.041 lansia dalam DTKS belum menerima bansos; sisanya ± 6.000 belum masuk DTKS.
- Program bantuan Rp 1.000.000 per lansia perlu dikaji ulang agar tidak menimbulkan ketimpangan terhadap nominal bansos yang sudah ada (PKH/BPNT: hanya Rp 200.000 - Rp 400.000).
- Ditekankan perlunya sinkronisasi data Dukcapil dan Dinsos serta penyiapan dasar hukum yang kuat.

b. Kartu Sehat

- 301.901 jiwa (95% penduduk Luwu Timur) sudah tercover UHC per Desember 2024; target RPJMD 98% *coverage*.
- Alokasi anggaran UHC mencapai Rp 58 miliar.
- Sasaran adalah seluruh warga berbasis NIK/KTP, namun perlu kejelasan untuk warga pindahan dan non-domisili Luwu Timur.
- Rumah Sakit Ilagaligo sebagai pelaksana utama perlu dibenahi sebagai prasyarat keberhasilan layanan Kartu Sehat.
- Kegiatan yang dicover Kartu Sehat harus dirinci secara detail dan transparan.

c. Kartu Pintar

- Tahun 2025 dialokasikan bantuan seragam untuk 17.500 siswa (PAUD, SD, SMP) dengan total anggaran lebih dari Rp 7 miliar.
- Dana Rp 2 miliar sudah dianggarkan di APBD Pokok 2025; masih diperlukan tambahan Rp 5 miliar di APBD Perubahan.

- Mekanisme pengadaan seragam melalui UMKM lokal; Pansus menekankan harus transparan, tidak monopoli, dan tepat sasaran.
- Kartu tidak berupa uang tunai, hanya dapat digunakan untuk belanja di UMKM mitra.
- Perlu dikaji kecukupan nilai bantuan dan ketepatan barang yang disalurkan.

3. Penekanan Asas Keadilan, Transparansi, dan Partisipatif

- Seluruh anggota Pansus menegaskan pentingnya keadilan distribusi manfaat, validitas data penerima, dan transparansi penggunaan anggaran pada setiap program unggulan.
- Ditekankan pentingnya data rinci dan resmi dari OPD sebagai dasar pembahasan dan pengambilan keputusan.

4. Program BKK: 2 Miliar per Desa

- BKK Desa akan diberikan dalam bentuk kombinasi: Rp 1 Miliar dalam bentuk Dana Desa (ditransfer ke rekening Desa) dan Rp 1 Miliar dalam bentuk kegiatan OPD selama 5 tahun.
- Fokus penggunaan diarahkan untuk pengembangan potensi khas Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Beberapa komponen anggaran yang sebelumnya termasuk BKK kini dialihkan ke dinas lain (misal: honor guru ngaji), namun tetap dijamin pembayarannya.

5. Program Beasiswa Mahasiswa

- Total kebutuhan anggaran mencapai Rp 39 Miliar:
 - S1: Rp 32 miliar untuk 1.500 mahasiswa (@Rp 3 juta per semester)
 - S2: Rp 6 miliar untuk 70 mahasiswa
 - S3: Rp 1 miliar
- Anggaran yang baru tersedia dalam APBD Pokok 2025 sebesar Rp 13 miliar; dibutuhkan tambahan Rp 25 miliar di APBD Perubahan.

6. Program Pupuk Gratis Plus

- Diperuntukkan bagi kelompok tani terdaftar, difokuskan pada sektor pangan (padi).
- Luas lahan sawah 26.257 hektar; kebutuhan anggaran per musim tanam mencapai Rp 31 miliar lebih.
- Bantuan Rp 2 juta per hektar akan mulai dianggarkan pada APBD Pokok 2026, karena masa tanam padi sudah jatuh pada Juni/Juli 2025.

7. Arahan Penutup

- Ketua Pansus menegaskan perlunya penyerahan data lengkap, valid, dan terkini dari seluruh OPD, baik dalam bentuk digital maupun cetak.
-